

**DISFUNGSI PENGELOLAAN KAMPUS PURNAMA UNIVERSITAS RIAU  
DALAM URUSAN PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA DUMAI TAHUN 2014-  
2017**

**Hapis Akbar**

Email: [hapisakbar51@gmail.com](mailto:hapisakbar51@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*University of Riau is one of the State Universities in Riau, University of Riau is a State University that has locations in two places, one of which is Purnama University of Riau which is located in Dumai City which has been in existence since 1994 and used until 2006, in In 2006, the campus activities moved in Pekanbaru City at the same time the campus was not used so it was abandoned, this study aimed, identified and explained the causes of the dysfunction of the management of the Puranama Campus in Riau University in matters of higher education. And identify and explain the obstacles in managing the Purnama University of Riau Campus in higher education matters. This study uses the theory of optimization processes in management by M. Yusuf. this study uses a qualitative approach. Data collection of interviews and documents after being collected is analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that the first task was not carried out by the head of the Higher Education Service Institution or Chancellor of the University of Riau in the implementation of facilities to improve the quality of higher education in their work areas. the legal basis is maximally especially in the field of campus supervision and maintenance, the potential possessed by the University of Riau's Purnama Campus which cannot yet be maximized is part of the constraint, then the ability of human resources is also an obstacle related to the management of Purnama University in Riau.*

**Keywords:** *management dysfunction, higher education, Purnama Campus and University of Riau*

## Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada alenia ke 4 adanya mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia. Salah satu dari kriteria kesejahteraan ialah untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi tingginya tanpa ada perbedaan dari masyarakat Indonesia.

Universitas Riau merupakan suatu perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Indonesia yang berdiri sejak tahun 25 september 1962,

Universitas Riau mendapat bantuan dari Bank Dunia Pada tahun.

1989 dalam rangka untuk meningkatkan perguruan tinggi pada bidang ilmu kelautan, hasil dari bantuan tersebut berupa pembangunan di Kota Dumai yang diperuntukan untuk Program Studi Ilmu Kelautan menimbang lokasi Kota Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Rupat sehingga kampus Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Riau terbagi menjadi dua yakni di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, adapun bangunan yang di dapat berupa:

**Tabel 1 Rumah Dan Bangunan Kampus Purnama Universitas Riau Tahun 2014-2016**

No	Jenis Bangunan	Jumlah
1	Rumah Negara Type 120	8
2	Rumah Negara Type 70	10
3	Rumah Negara Type 50	11
4	Rumah Negara Type 36	34
5	Bangunan Flat/Rumah Susun Permanen	1
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
9	Bangunan Gedung Asrama Permanen	1

Sumber: Data BMN Universitas Riau Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat 1 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala, Dan tugas Kepala pada pasal 6 ayat 1 mempunyai tugas

memimpin pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Diantara lain penyusunan rencana, Program, Kegiatan, dan anggaran LLDIKTI di wilayah kerjanya pada Universitas Riau di bantu oleh Wakil Rektor II. Adapun tugas dan fungsi LLDIKTI, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;

3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
6. Pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan
7. Pelaksanaan administrasi LLDIKTI.

Landasan aturan tentang pemeliharaan ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada BAB VII Pengamanan Dan Pemeriharaan pada pasal 42 ayat 1 “pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada dalam pengusaanya, pada ayat 2 pengamanan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum”. Dan pada pasal 46 pada ayat 1 “pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik Negara/daerah yang berada dibawah penguasaanya. Dan dipertegas” pada BAB XVII Ganti Rugi Dan Sanksi pasal 99 ayat 1 “setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ayat 2 “setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat

dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa point yang membuat peneliti tertarik untuk mengangakat tema ini:

1. Tidak digunakanya Kampus Purnama Universitas Riau (KPUR) oleh Program Studi Ilmu Kelautan mengakibatkan kurangnya pengelolaan pada KPUR secara baik dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dalam salah satu media online “Keberadaan Universitas Riau (UR) di Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama Kota Dumai, sudah berpuluh tahun di Kota Dumai tidak jelas keberadaan dan fungsinya sebagaimana dengan seharusnya sebuah universitas, seperti sarana pendidikan lainnya.<sup>1</sup> Dari kabar berita di atas tentang lokasi dari kampus Universitas Riau yang berada di Kota Dumai yang kurang diketahui oleh banyak masyarakat Riau dan fungsinya, sejak beberapa tahun terakhir seharusnya kampus tersebut digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar mahasiswa dan dosen bagi penggunaanya. Menurut Bapak Irfan Ramzi S.pi Selaku Kepala Operator Barang Milik Negara Universitas Riau mengatakan:<sup>2</sup>

*“ Sejak KPUR ditinggalakan oleh Program Studi Ilmu Kelautan, KPUR saat ini kurang dikelola banyak bangunan yang tidak terawat juga barang-barang kampus yang dipindahkan ke Pekanbaru, hingga saat ini KPUR belum adanya perbaikan dari Universitas Riau ”*

<sup>1</sup>Tekad tabloid,”  
<https://tabloidtekad.wordpress.com/2012/02/14/marine-station-dihidupkan-lagi/> “, pada tanggal 26 mei 2017 pukul 12:40

<sup>2</sup>Wawancara dengan Irfan Ramzi tanggal 12 April 2018 di gedung Rektorat Universitas Riau

Menurut Bapak Irfan Ramzi seharusnya KPUR dipergunakan secara keseluruhan baik itu Program Studi maupun jurusan yang ada di Universitas Riau mengingat dari bangunan yang tidak digunakan akan lebih dirugikan apabila perawatan dari KPUR terus dilaksanakan juga mempertimbangkan dari bangunan KPUR yang tidak digunakan dan tidak dikelola dengan baik akan merugikan aset Universitas Riau yang tidak terpakai.

2. Sejak tidak digunakannya Kampus Purnama Universitas Riau KPUR oleh Program Studi Ilmu Kelautan KPUR digunakan oleh beberapa Program Studi dan jurusan yang ada di Universitas Riau.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, semenjak ditinggalkan oleh Program Studi Ilmu Kelautan bangunan KPUR digunakan oleh beberapa program studi/jurusan-jurusan seperti pendidikan Advokasi Universitas Riau, S2 Lingkungan Universitas Riau, dan S2 Manajemen Pendidikan Universitas Riau dan pada tahun 2012 digunakan sebagai jurusan baru diprogram studi D3 Maritim dan D3 Informatika Universitas Riau dan Akademi Keperawatan Sribunga Tanjung Dumai, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau, S2 Sosiologi Universitas Riau, Program Studi Keperawatan Universitas Riau data yang terakhir bangunan tersebut dijadikan SMK Farmasi Ika Sari Dumai dari cabang Pekanbaru juga

merupakan Yayasan Universitas Riau. Dari semua Program Studi tersebut yang menggunakan KPUR hanya bangunan gedung kantor, laboratorium, dan gedung pendidikan sedangkan bangunan lainnya terakhir digunakan pada tahun 2006 oleh Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Riau.

3. Kurang maksimalnya fasilitas ruangan SMK Farmasi Ikasari Dumai dalam menggunakan Kampus Purnama Universitas Riau.

Pada data terakhir bangunan KPUR yang digunakan oleh SMK Farmasi Ikasari, Berdasarkan table dibawah SMK Farmasi Ikasari Dumai hanya menggunakan 1 bangunan gedung dengan total 14 ruangan, SMK Farmasi Ikasari Dumai hanya menggunakan 9 ruangan dari 14 ruangan yang digunakan ruangan SMK Farmasi Ikasari Dumai dapat dikategorikan dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR) dan Rusak Sedang (RS). Status bangunan yang digunakan oleh SMK Farmasi Ikasari Dumai hanya pinjam pakai atas kebijakan dari kepala yayasan SMK Farmasi Ikasari Dumai yang juga Wakil Rektor 1 (WR1) Universitas Riau. Karena KPUR masih bagian dari Faperika berdasarkan informasi dari Barang Milik Negara (BMN) Universitas Riau, disini WR1 hanya pinjam pakai selaku yayasan dari SMK Farmasi Ikasari Dumai.

**Tabel 2 Fasilitas Ruangan SMK Farmasi Ikasari Dumai Di Kampus Purnama Universitas Riau**

NO	Jenis Rungan	Jenis Bangunan	Kondisi	Jumlah
1	Ruang Kelas	Bangunan Gedung Adniminstrasi	B(4) RR(1)	5
2	Laboratorium	Bangunan Gedung Adniminstrasi	B	1
3	Perpustakaan	Bangunan Gedung Adniminstrasi	RR	1
4	Sanitasi Siswa	Bangunan Gedung Adniminstrasi	RS(1) RR(1)	2
Jumlah				9

Sumber: Data Smk Farmasi IkasariDumai Tahun 2017

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari berita-berita dan argument dari beberapa pihak besarnya bangunan dan dana yang telah dikeluarkan dan dibuat yang hanya digunakan beberapa tahun saja. maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa disfungsi pengelolaan bangunan Kampus Puranama Univeresitas Riau dalam urusan pendidikan tinggi bisa terjadi.?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan bangunan Kampus Purnama Universitas Riau dalam urusan pendidikan tingg.?

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab disfungsinya pengelolaan bangunan Kampus Puranama Univeresitas Riau dalam urusan pendidikan tinggi.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan Kampus Purnama Universitas Riau dalam urusan pendidikan tinggi.

## KONSEP TEORI

Menurut M. yusuf untuk dapat melancarkan proses optimalisasi selain kondisi pasar dan mekanisme investasi, yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain sebagai berikut.

- (a) Sruktur kelembagaan dan sumber daya para pengelola aset/barang, karena kelembagaan dan sumber daya akan menentukan berhasilnya optimalisasi. Semua aparat birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset harus mempunyai tanggung jawab sesuai batas kewenagannya agar aset yang tersebar tetap terkendali,

baik melalui mekanisme koordinasi maupun mekanisme konsolidasi.

- (b) Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan aset/barang milik daerah yang terpadu, efesien, efektif, serta memiliki kewengan dan otoritas yang jelas.
- (c) Membuat standar penggunaan barang atau aset yang akan dibeli oleh pemerintah daerah dalam kerangka memnuhi prinsip efesien, efektif, serta ekonomis (value for money) dalam pengadaan dan penggunaan, khususnya untuk mendapatkan return on aset (ROA) yang tinggi dan optimal untuk mendukung oprasional pemerintah.
- (d) Inventarisasi dan penilaian seluruh aset dan ditindaklanjuti dengan legalitas hukum yang jelas. Nilai harus benar-benar mencerminkan kondisi aset, baik nilai yang sudah ada (*existing*) maupun potensional aset.
- (e) Landasan hukum pengelolaan harus dioperasioanakan.
- (f) Pengawasan dan pengendalian harus benar-benar ketat. Untuk tanah dapat berkerja sama dengan badan pertanahan Nasional atau pihak lain dalam melakukan pemetaan dalam suatu peta pertanahan yang terpadu dalam bentuk sistem informasi geografis.
- (g) Penggunaan tanah oleh setiap lembaga pemerintah harus memiliki standar luas.
- (h) Tanah yang berasal dari sarana dan prasarana perumahan dan permukiman harus memiliki kepastian, agar tidak dapat berubah fungsi kecuali ada dasar hukum dan latar perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (i) Menggali dan mengkaji potensi dan alokasi aset-aset yang dapat dikerjasamakan dengan pihak investor sebagai sumber pendapatan daerah agar dalam jangka panjang keuangan daerah tidak tergantung pada pajak, retribusi, maupun dana perimbangan.
- (j) Mendukung peningkatan kemampuan manajemen dan bisnis bagi insitusi yang menguasai dan mengelola aset daerah dalam upaya optimalkan manfaat dan potensi yang ada, khususnya dalam rangka pemberdayaan BUMD maupun aset yang dikerjasamakan.
- (k) Meningkatkan profesionalisme SDM dalam bidang manajemen property/penilaian property dan keuangan daerah.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.<sup>4</sup> Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Disfungsi Pengelolaan Bangunan Kampus Puranama Univeresitas Riau

<sup>3</sup> M. Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hal 165

<sup>4</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: konsep-konsep kunci*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 212.

Dalam Urusan Pendidikan Tinggi Univeresitas Riau Tahun 2014-2016.

Menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup> Dengan menggunakan strategi penelitian fenomologi atau menggambarkan pemaknaan beberapa individu informan mengenai pengalaman hidupnya, pemaknaan mengenai konsep atau fenomena tertentu.<sup>6</sup> Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang bangunan Kampus Purnama Universitas Riau.

## Disfungsinya Pengelolaan Kampus Purnama Universitas Riau Dalam Urusan Pendidikan Tinggi Di Kota Dumai Tahun 2014-2017.

Adapun tujuan pembuatan Kampus Purnama Universitas Riau (KPUR) untuk lebih meningkat dari tujuan program studi Ilmu Kelautan yakni:

- 1 Mengembangkan program pendidikan Ilmu Kelautan yang menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak terpuji,
- 2 Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi guna memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan,
- 3 Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik melalui sistem manajemen profesional,
- 4 Mengembangkan sarana/prasarana pendidikan, kegiatan ekstra kurikulum yang dinamis dan

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 197.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 206.

mengembangkan kerjasama kemitraan.

Pendirian gedung KPUR di Kota Dumai dalam rangka meningkatkan ekosistem kelautan yang ada di Indonesia dan terpilihlah Universitas Riau sebagai penerima bantuan dari perwakilan pulau Sumatera bagian timur dan terpilihnya Kota Dumai sebagai tempat pendirian dari KPUR tersebut dikarenakan masih alamnya hutan mangrove dari Kota Dumai dan luasnya tempat praktek bagi mahasiswa Ilmu Kelautan yang juga dekat dengan pulau Rupat yang masih terjaga keasliannya hutan bakaunya, dan pada tahun 2006 Ilmu Kelautan dipindahkan ke Kota Pekanbaru secara keseluruhan dan KPUR digunakan oleh beberapa jurusan dan sokolah tinggi lainnya berdasarkan teori dan fenomena yang didapat KPUR dibangun diperuntukan Ilmu Kelautan dengan landasan untuk meningkatkan maritim kelautan yang berada di Sumatera melalui sekolah tinggi negeri yakni Universitas Riau.

Berdasarkan kendala awal terjadinya tidak digunakan kampus Purnama dikarenakan kurangnya dosen pengajar di kampus tersebut, Program Studi Ilmu Kelautan yang terbagi menjadi dua tempat Pekan baru dan Dumai yang berjarak 200 kilometer jarak yang cukup jauh bagi seorang dosen yang ingin mengajar pada Kampus tersebut dan biaya transportasi yang tidak ditanggung oleh pemerintah atau Universitas Riau menjadikan beban pribadi bagi seorang dosen yang ingin mengajar di KPUR mengakibatkan kurangnya tenaga pengajar di kampus tersebut berdasarkan Pedoman Beban Kerja Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, adapun tugas utama dosen pada point 1 melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium,

praktik keguruan, praktik bengkel/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran; yang tidak terlaksanakan di Kampus Purnama Universitas Riau.

Dalam setiap organisasi memiliki pemimpin yang memiliki perencanaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat 1 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun fungsi dari LLDIKTI pada pasal 4 bagian b pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Dan tugas Kepala pada pasal 6 ayat 1 mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2006-2014 KPUR memiliki perencanaan untuk kampus tersebut perencanaan ini lebih pada masa jabatan rektor Bapak Prof. Mukhtar Ahmad, MSc yang lebih banyak program perencanaan ini diperuntukan oleh Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan yang juga merupakan desain awal dari kampus yang diberikan Program Studi Ilmu Kelautan perencanaan program tersebut antara lain. Bioteknologi Galangan Kapal, Pembibitan Kepiting, Pembibitan Udang, Wisata hutan Mangrove, dan Politeknik Kelautan yang tidak terlaksanakan dengan baik. Dan tidak adanya perencanaan program dari KPUR

yang telah di buat pada masa jabatan Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS menjadi rektor Universitas Riau beliau mengatakan pengguna dari kampus itu adalah Faperika maka dari itu Faperikalah melakukan kegiatan-kegiatan di kampus tersebut, ini membuktikan tidak adanya perencanaan dan penggunaan dari Universitas Riau secara aktif dari tahun 2006-2014 mengakibatkan terbengkalainya bangunan KPUR selama 8 tahun.

Sedangkan pada tahun 2014-2017 yang dilakukan oleh Universitas Riau dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan dan Kota Dumai tidak berjalan dengan baik karena besarnya biaya perbaikan untuk memperbaiki dari bangunan kampus tersebut, untuk digunakan oleh pihak pengguna dan status dari pengguna juga sebatas sewa dan sangat sulit untuk menggunakan kampus tersebut seperti semula karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Universitas Riau apabila ingin menggunakan dari bangunan itu seperti semula, Universitas Riau hanya bisa melakukan perawatan bagian halaman melalui Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Riau yakni petugas keamanan dan petugas kebersihan.

Sedangkan program yang telah berhasil dilaksanakan antara lain, pemeliharaan mangrove, program penghijauan Bank Mandiri Syariah, dan memperbaiki JT, dalam pelaksanaannya program yang berhasil dilaksanakan hanya sebatas dari pemberdayaan dari hutan Mangrove seperti halnya JT yang dibangun sebagai tempat pengawasan bagi petugas keamanan terhadap pencurian kayu yang berada di Kampus Purnama Universitas Riau (KPUR).

## **Kendala-Kendala Pengelolaan Kampus Purnama Universitas Riau Dalam Urusan Pendidikan Tinggi.**

### **1. Koordinasi Struktur Kelembagaan Pengelolaan**

Struktur kelembagaan dan sumber daya para pengelola aset/barang, karena kelembagaan dan sumber daya akan menentukan berhasilnya optimaslisasi. Semua aparat birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset harus mempunyai tanggung jawab sesuai batas kewenangannya agar aset yang tersebar tetap terkendali, baik melalui mekanisme koordinasi maupun mekanisme konsolidasi, dan menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan aset/barang milik daerah yang terpadu, efisien, efektif, serta memiliki kewenangan dan otoritas yang jelas. Dari setiap struktur pengelola KPUR harus mempunyai kewenangan yang jelas agar berjalananya pengelolaan sesuai apa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian tidak adanya aturan yang jelas dari Universitas Riau dan hal pengelolaan gedung menyebabkan tidak jelasnya pertanggung jawaban dari kampus Purnama tersebut dan masih kurangnya koordinasi dari kedua kepala bagian dalam melakukan pengelolaan kampus dan pendataan Kampus Purnama Universitas Riau.

### **2. Landasan Hukum Pengelolaan.**

Dalam pengelolaan KPUR menggunakan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada pasal 4 ayat 2 menyatakan pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab, juga memberikan pandangan tentang pengawasan dan pengendalian harus benar-benar ketat. Untuk tanah dapat berkerja sama

dengan badan pertanahan Nasional atau pihak lain dalam melakukan pemetaan dalam suatu peta pertanahan yang terpadu dalam bentuk sistem informasi geografis, pengawasan KPUR yang saat ini diawasi oleh Rumah Tangga sebagai penanggung jawab dari bangunan tersebut, dan mengesahkan tanah KPUR dengan mendaftarkan diri ke Badan Pertanahan Nasional dengan menghasilkan sertifikat tanah. Juga Menambahkannya tentang membuat standar penggunaan barang atau aset yang akan dibeli oleh pemerintah daerah dalam kerangka memenuhi prinsip efisien, efektif, serta ekonomis (*value for money*) dalam pengadaan dan penggunaan, khususnya untuk mendapatkan *Return On Aset* (ROA) yang tinggi dan optimal untuk mendukung operasional pemerintah. Maksudnya disini adalah membeli barang yang sesuai kebutuhan tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan untuk mengoptimalkan proses dari pemerintah/sekolah tinggi tersebut dan memberikan pandangan terkait Inventarisasi dan penilaian seluruh aset dan ditindaklanjuti dengan legalitas hukum yang jelas. Nilai harus benar-benar mencerminkan kondisi aset, baik nilai yang sudah ada (*existing*) maupun potensial aset.

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang dilakukan pada Kampus Purnama belum berjalan secara maksimal di karenakan jarak yang jauh dari Universitas Riau yang berada di Pekanbaru sebagai pusatnya Universitas Riau, pada sector tanah Kampus Purnama telah berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN yang berarti kampus tersebut sudah memiliki tanah yang jelas keberadaanya, dari tahun 2014-2017 Kampus Purnama Universitas Riau tidak adanya perbaikan hanya saja pembangunan Jembatan JT sebagai pengawasan bagi petugas

kemanan pada hutan *mangrove*, sedangkan dalam hal Inventarisasi Kampus Purnama Universitas Riau mendapatkan nilai harga yang tidak semestinya ini disebabkan dengan keadaan kampus dalam kondisi yang didominasi rusak sedang, dalam melakukan inventarisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tidak turun kelapangan hanya melihat dari laporan kondisi bangunan yang diberikan oleh Universitas Riau menghasilkan data yang tidak sempurna dikarenakan setiap bangunan dalam satu kondisi yang sama akan memiliki kerusakan yang berbeda-beda.

### **3. Pengembangan Potensi Aset.**

Menggali dan mengkaji potensi dan alokasi aset-aset yang dapat dikerjasamakan dengan pihak investor sebagai sumber pendapatan daerah agar dalam jangka panjang keuangan daerah tidak tergantung pada pajak, retribusi, maupun dana perimbangan. Maksudnya melihat dari gedung KPUR yang dapat dikembangkan atau dikerjasamakan untuk berfungsinya dari gedung tersebut sebagai tempat perkuliahan hal yang menguntungkan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian potensi yang paling besar di kampus tersebut adalah menjadikan kampus seperti semula yakni sebagai Program Studi Ilmu Kelautan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan terutama pada kampus yang berdekatan dengan lingkungan laut, tetapi untuk merealisasinya sangatlah sulit karena untuk saat ini butuh dana yang cukup besar untuk mengembalikan seperti semula, dan sulitnya untuk dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota maupun perusahaan-perusahaan yang ada dikarenakan biaya yang cukup besar untuk perbaikan bangunan juga pengguna harus

membayar uang sewa bangunan pada Universitas Riau.

#### **4. Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Manajemen.**

Mendukung peningkatan kemampuan manajemen dan bisnis bagi insitusi yang menguasai dan mengelola aset daerah dalam upaya optimalkan manfaat dan potensi yang ada, khususnya dalam rangka pemberdayaan BUMD maupun aset yang dikerjasamakan. Dalam hal ini membuat gedung KPUR untuk dikembangkan dari potensi yang ada atau memaksimalkan dari potensi yang ada dan Meningkatkan profesionalisme SDM dalam bidang manajemen *property*/penilaian *property*.

kurang dalam melakukan pelatihan atau seminar-seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang manajemen terkhusus dalam penilaian *property* dan keuangan ini terbukti hanya Bapak Tri Gunawan S.sos yang pernah mendapatkan pelatihan tentang Inventarisasi sedangkan Bapak Mulyana yang saat ini menjabat sebagai BMN Faperika tidak pernah sama sekali mendapatkan pelatihan atau seminar dalam hal manajemen penilaian *property* hal ini sangat disayangkan mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh informan berikut merupakan milik Negara dengan nilai yang sangat besar dan juga merupakan tanggung jawab besar, dengan besarnya aset yang dimiliki oleh Universitas Riau juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian agar memberikan pengelolaan aset.

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul Disfungsi Pengelolaan Kampus Purnama

Universitas Riau dalam urusan pendidikan tinggi di Kota Dumai tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut

1. Ada beberapa penyebab terjadinya Disfungsi Pengelolaan Kampus Purnama Universitas Riau dalam urusan Pendidikan Tinggi, tidak terlaksanakannya tugas dari kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Rektor Universitas Riau dalam pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Terutama pada bidang perencanaan dan pelaksanaannya dari tahun 2006 hingga 2017 yang tidak terlaksanakan.
2. Kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan Kampus Purnama Universitas Riau dalam urusan pendidikan tinggi, kurangnya koordinasi dari setiap subagian rektorat Universitas tugasnya, kurangnya berjalanya landasan hukum secara maksimal terutama pada bidang pengawasan dan perawatan kampus yang kurang maksimal, besarnya potensi yang dimiliki kampus purnama Universitas Riau yang belum bisa di maksimalkan dan belum memiliki rencana yang pasti dari kampus tersebut untuk kedepannya, Lemahnya kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen di dalam sruktur pengelola Kampus Purnama Universitas Riau terutama pada bagian Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara yang memberikan kondisi disetiap bangunan kampus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Glogalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, M. 2013. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Selemba Empat.

Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara Peran Konsultan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Supriyanto, Budi. 2009, *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)*. Tangerang: CV. Media Brilian.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dwijowijoto, Riant Nugraha. 2003. *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigm Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Klompok Gramedia.

Nofrizal. dkk. 2014. *Pengembangan galangan kapal kayu*. Pekanbaru: Unri Press Universitas Riau

Nanang, Martono. 2016. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.

### B. Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

### C. Publikasi Pemerintah

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010. *Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi*

### D. Surat Kabar Online

Riauterkini. (2015).SMK Farmasi Ikasari segera dIbua di Dumai diakses dari <http://www.riauterkini.com/pendidikan.php?arr=87546&judul=SMK%20Farmasi%20Ikasari%20Segera%20Dibua%20di%20Du>

[mai](#) diakses pada tanggal 26 mei 2017

Tabloid tekad. (2014). Marine Station dihidupkan lagi diakses dari <https://tabloidtekad.wordpress.com/2012/02/14/marine-station-dihidupkan-lagi/> diakses pada tanggal 26 mei 2017

Tempo.com. (2014). Hanya 30% Pelajar Bisa Kuliah. Diakses dari

<https://nasional.tempo.co/read/583184/hanya-30-persen-pelajar-bisa-kuliah> 27 Mei 2017 pukul 13.00

sekolah data kementerian pendidikan dan budaya (2017) diakses dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/BF507A14-2E33-4226-8E77-494D04B355F5> diakses 27 Mei 2017 pukul 13.00.